

**KEMISKINAN SEBAGAI PENYEBAB STRATEGIS PRAKTIK *HUMAN TRAFFICKING*
DI KAWASAN PERBATASAN JAGOI BABANG (INDONESIA-MALAYSIA)
KALIMANTAN BARAT**

Nikodemus Niko

Jurusan Sosiologi Program Pascasarjana FISIP Universitas Padjajaran

Abstract

This paper aims to describe the poverty phenomenon is the cause of the Human Trafficking practice in the border area Jagoi Babang, Bengkayang District West Kalimantan. The fact that it happens that the border area is still very vulnerable to the illegal smuggling. Poverty has become factor's falling border residents in a circle phenomenon of trafficking, either as perpetrators or as victims. In fact, women and children are particularly vulnerable groups are victims of trafficking in the border area.

Keyword: ***Poverty, Border Area, Human Trafficking***

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fenomena kemiskinan yang menjadi penyebab terjadinya praktik *Human Trafficking* di wilayah perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Fakta yang terjadi bahwa wilayah perbatasan masih sangat rawan terhadap berkembangnya penyelundupan baik berupa barang maupun manusia secara ilegal. Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab terjerumusnya warga perbatasan dalam lingkaran fenomena *trafficking*, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pada kenyataannya perempuan dan anak menjadi kelompok yang sangat rentan menjadi korban *trafficking* di wilayah perbatasan.

Kata Kunci: ***Kemiskinan, Wilayah Perbatasan, Human Trafficking***

Pendahuluan

Sejak dahulu hingga jaman masyarakat teknologi masa kini, wilayah perbatasan negara masih saja menjadi halaman paling belakang di negeri ini. Meski banyak deklarasi yang menyatakan bahwa kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan sebuah negara. Namun pada kenyataannya belum terlihat berarti pembenahan yang dilakukan pemerintah, bahkan hanya dirasa masih sangat lamban dan jalan ditempat. Masalah-masalah yang melanda seolah tiada solusi, seperti misalnya permasalahan kemiskinan yang kian membelenggu masyarakat perbatasan yang mendiami wilayah pedesaan.

Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Jagoi Babang Kalimantan Barat masih ditandai dengan adanya keterisolasian wilayah, keterbelakangan ekonomi dan

sumber daya manusia, keterbatasan akses sarana dan prasarana, maraknya pekerja ilegal (*illegal workers*) serta menjamurnya praktik *human trafficking* (perdagangan manusia). Praktik perdagangan ilegal di wilayah perbatasan ini memang sangat sulit sekali terdeteksi oleh aparat keamanan perbatasan negara. Hal ini dikarenakan banyaknya jalur tikus untuk aksi penyeludupan baik itu barang-barang ilegal maupun praktik penyeludupan manusia.

Satu diantara isu global yang semakin berkembang dan menjadi perhatian seksi menjadi perbincangan pada masyarakat lokal maupun Internasional masa kini yaitu isu *human trafficking* yang kian berkembang. Jenis perdagangan ini termasuk dalam kategori kejahatan yang sangat berbahaya karena sasarannya adalah anak-anak dan perempuan. Kalimantan Barat yang merupakan jalur perbatasan darat secara langsung dengan negara Malaysia, memiliki potensi besar terhadap praktik *human trafficking* baik di wilayah perbatasan Jagoi maupun di beberapa wilayah perbatasan lainnya.

Pelaporan-pelaporan kasus trafficking masih belum maksimal dan menyeluruh, dimana masih terdapat banyak pelaku trafficking berkeliaran, yang notabene-nya mereka adalah masyarakat biasa. Mereka menjadi agen (yang tidak memiliki surat resmi atau ilegal), kemudian merekrut korban menjadi pekerja di wilayah Malaysia. Namun, tidak sedikit diantara pekerja-pekerja dari agen ilegal ini kemudian berhasil dan dapat membawa keluarga mereka keluar dari belenggu kemiskinan.

Meskipun demikian, tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat *check* dan *recheck* agen ilegal ini dalam upaya pencegahan kasus trafficking, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkayang. Terlihat jelas bahwa pola rekrutmen yang dilakukan agen terhadap korban yaitu melalui keluarga-keluarga yang miskin yang kemudian diajak, dibujuk dan dirayu untuk ikut bekerja di Malaysia dengan iming-iming uang gaji dibayar dimuka. Bagaimana mereka tidak tergiur, belum bekerja saja mereka sudah di kasi uang sebagai tanda jadi penukaran anak perempuan mereka. Berikut kerangka perdagangan manusia yang meliputi proses, cara serta tujuannya:

Tabel 1.1
 Kerangka perdagangan manusia

Proses/cara	+	Jalan/cara	+	Tujuan
Perekrutan		Ancaman		Prostitusi
Atau		Atau		Atau
Pengiriman		Pemaksaan		Pornografi
Atau		Atau		Atau
Pemindahan		Penculikan		Kekerasan/eksploitasi seksual
Atau		Atau		Atau
Penampungan		Penipuan		Kerja paksa
Atau		Atau		Atau
Penerimaan		Kebohongan		Perbudakan/praktik serupa

		Atau		Atau
		Penyalahgunaan kekuasaan		Pengambilan organ tubuh

Sumber: Rosenberg (2003: 16)

Peredaran jaringan ilegal yang masuk ke wilayah perbatasan ini berasal dari jaringan internasional yang teroganisir. Praktik *human trafficking* ini merupakan kejahatan yang tidak dapat di tolerir di negara manapun termasuk di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU PTPPO), hal ini sebagai tanggapan dan bukti keseriusan pemerintah dalam merespon kejahatan yang sudah bertaraf internasional ini.

Sebab-sebab terjadinya *trafficking* sebagaimana menurut United Nation Global Initiative to Fight Human Trafficking (dalam Subono, 2010:31) sebagai berikut: a) kekerasan berbasis gender; b) praktek-praktek ketenagakerjaan yang diskriminatif; c) struktur sosial yang partiarki; d) memudarnya jaringan ikatan keluarga; e) marginalisasi etnik, ras, dan agama; f) pemerintahan yang korup dan gagal; g) persoalan status (sebagai warga negara atau penetap legal yang berkaitan dengan kerja); h) peran dan posisi perempuan dalam keluarga; i) hirarki kekuasaan dan tertib sosial; j) tanggung jawab dan peran anak-anak; k) menikah dini; l) tingginya laju perceraian dan stigma sosial yang menyertainya m) rusaknya perkembangan kepribadian; n) terbatasnya prestasi atau pencapaian pendidikan; dan o) terbatasnya kesempatan ekonomi.

Disisi lain menurut Farhana (2010, 74-76) Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan orang sebagai berikut:

1. Materialisme: skema modernisasi di Asia Tenggara menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak merata, sehingga menciptakan gap atau jurang yang semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin, antara daerah perkotaan dan pedesaan dan di antara berbagai daerah. efek dari media massa menyatukan masalah dengan cara menyuburkan budaya konsumerisme dan keinginan untuk pergi ke kota. Masyarakat di pedesaan cenderung untuk meninggalkan gaya hidup berjuang guna memperoleh kenyamanan hidup dan mudah mencari uang.
2. Kemiskinan: orang-orang yang miskin yang putus asa ataupun yang hanya memang ingin mencari kehidupan yang lebih baik adalah korban dari para perdagangan orang.
3. Kehancuran keluarga: ketiadaan fungsi atau keluarga yang hancur, masalah dengan orang tua tiri, kekerasan dalam keluarga, problem-problem keluarga lainnya yang sejenis mempengaruhi anak-anak yang meninggalkan rumah.
4. Jaringan migrasi ke luar: jaringan migrasi ke luar telah menjadi aspek paling penting dalam menjelaskan tentang anak-anak muda yang migrasi ke luar. Terdapat beberapa desa dimana migrasi ke luar daerah atau luar negeri telah menjadi begitu melembaga, sehingga menjadi suatu tren di antara anak-anak muda sehingga dapat terjadi kemungkinan untuk diperdagangkan.

5. Kurangnya pendidikan dan informasi: ketidakpedulian akan perdagangan orang, sekelompok para perekrut yang menjanjikan uang banyak kepada anak-anak mereka untuk mau bekerja di kota-kota besar.
6. Budaya: nilai-nilai budaya seperti kepatuhan atau kewajiban seseorang anak terhadap orang tuanya menghasilkan suatu sikap bahwa seseorang anak harus bekerja di luar rumah atau keluarganya untuk membantu orang tua atau saudaranya. Ada juga suatu sikap bahwa seseorang anak harus membayar tanda terima kasih kepada orang tua. Nilai-nilai inilah yang memberi andil kepada perdagangan.
7. Insensitivitas dan ketidakadilan gender: anak gadis dan perempuan lebih rentan terhadap perdagangan orang. Rata-rata negara di Asia Tenggara memakai budaya dominasi laki-laki yang menyebabkan perlakuan-perlakuan tidak adil yang menguntungkan anak laki-laki. Anak laki-laki diberikan pendidikan, sekolah, kesempatan kerja yang lebih baik, dan juga budaya macho atau jantan (pemberani) menerima bahwa laki-laki boleh pergi ke prostitusi.
8. Akibat buruk yang ditinggalkan dari perang: periode perang yang cukup lama menyebabkan pelemahan spirit atau semangat komunitas dan kehancuran keluarga yang menguntungkan aktivitas dari para pedagang.
9. Korupsi pejabat dan kolaborasi: lingkaran atau jaringan perdagangan beroperasi dengan kekebalan hukum, karena pejabat pemerintah yang korup dan tidak bermoral melindungi mereka.

Salah satu wilayah yang menjadi sorotan dalam hal terjadinya masalah kemanusiaan berupa perdagangan manusia adalah wilayah perbatasan khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Daerah perbatasan Kalimantan Barat melintasi lima kabupaten yaitu: Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas hulu. Dalam banyak kajian sorotan masih tersentral pada wilayah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau, karena hanya Entikong satu-satunya yang memiliki *gate border* resmi imigrasi. Sedangkan empat kabupaten lainnya masih melalui PPLB (Pos Pemeriksaan Lintas Batas), atau melalui "jalan tikus" (jalur jalan melewati hutan).

Berdasarkan data laporan dari LSM anak bangsa dari tahun 2007-2010 jumlah korban perdagangan perempuan dan anak melalui PPLB Entikong Kabupaten Sanggau berjumlah 1.599 (Elyta, 2012:2). Sedangkan beberapa kasus *human trafficking* yang terjadi di wilayah perbatasan di empat kabupaten lainnya masih belum dapat terdeteksi. Hal ini dikarenakan wilayah perbatasan selain Entikong memang masih belum banyak di ekspose ke permukaan mengenai permasalahan *human trafficking*.

Pada dasarnya pemerintah Indonesia sudah sangat *respect* terhadap kejahatan perdagangan manusia ini. Pada laporan *US Department of state* pada periode juni 2007 terungkap perhatian pemerintah indonesia atas masalah perdagangan manusia semakin meningkat dengan menempatkan indonesia dalam Tier-2. Salah satu alasan indonesia masuk negara Tier-2 karena negara telah memiliki

UU tentang pemberantasan perdagangan manusia yaitu UU tentang pemberantasan perdagangan manusia yaitu UU Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Elyta, 2012:5).

Dimulai pada tahun 2004, pemerintah Indonesia menunjukkan kemajuan nyata dalam menerapkan usaha penegakan hukum yang lebih besar dalam memerangi perdagangan manusia dan membantu korban perdagangan manusia asal Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran yang telah diperdagangkan. Pemerintah secara berarti meningkatkan hukuman bagi pelaku perdagangan manusia dan mengadopsi prosedur standar operasi untuk melindungi korban (Farhana, 2010:152).

Kawasan perbatasan Jagoi Babang merupakan kawasan pedesaan yang masih belum berkembang secara pesat. Belum terdapat *gate border* resmi di kawasan ini. Permasalahan kompleks terjadi di kawasan ini karena jarak ke negara tetangga (Malaysia) sangat dekat. Sehingga masyarakat cenderung membeli sembako (sembilan bahan pokok) dan menggunakan mata uang Ringgit Malaysia (RM) untuk bertransaksi sehari-hari. Harga sembako yang dijual pun cenderung murah dibandingkan harga barang dari Indonesia.

Murahnya harga barang dari Malaysia membuka peluang usaha baru bagi segelintir orang di perbatasan Jagoi, banyak tempat penampungan barang-barang ilegal yang tidak terdeteksi. Mudahnya perpindahan barang antar negara ini juga membuka lebar praktik *human trafficking* di wilayah perbatasan Jagoi. Tidak adanya pengawasan ketat di pos pemeriksaan dokumen perjalanan antar negara. Masyarakat tidak perlu memiliki paspor untuk bepergian ke Malaysia, hanya dengan PLB (Pas Lintas Batas) sebagai dokumen perjalanan yang dapat dibuat dengan harga Rp100.000 di kantor desa. Masyarakat di perbatasan Jagoi ini juga memiliki banyak akses 'jalan tikus' untuk menuju ke wilayah Malaysia, sehingga hal ini tentu menimbulkan potensi besar terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal, tidak terkecuali adalah penyelundupan manusia untuk menjadi TKI ilegal.

Masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah perbatasan Jagoi merupakan salah satu alasan bagi masyarakat untuk mengadu nasib di negeri Jiran. Berdasarkan data dari pemerintah Kecamatan Jagoi Babang tahun 2013, tercatat sebanyak 1.537 KK (kepala keluarga) hidup di garis kemiskinan dari jumlah total 1.679 KK di Jagoi Babang. Kondisi ini sangat memprihatinkan, padahal potensi Sumber Daya Alam (SDA) di daerah ini sangat besar. Sebagai contoh, masyarakat menjual hasil kebun mereka seperti sayur-sayuran dan rempah-rempah ke pasar Serikin, Malaysia.

Fenomena kemiskinan yang terjadi pada masyarakat perbatasan Jagoi juga berimbas terhadap nasib anak-anak. Kemiskinan 'memaksa' anak harus bekerja membantu perekonomian orang tua. Mereka bekerja sambilan dari siang hari hingga sore hari (setelah pulang sekolah—bagi mereka yang sekolah pagi). Ada pula yang bekerja dari pagi hingga siang hari (sebelum berangkat sekolah—bagi mereka yang sekolah siang) (Niko, 2015). Kemiskinan juga menarik banyak anak perempuan menjadi korban perdagangan orang. Mereka yang berasal dari desa dan direkrut oleh *agent* ilegal yang membawa mereka bekerja di Malaysia. Oleh karena itu, makalah ini ingin mengkaji lebih jauh fenomena kemiskinan yang menjadi penyebab

strategis terjadinya praktik *Humman Trafficking* di kawasan perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat.

Perempuan Perbatasan Rentan Menjadi Korban *Trafficking*

Data kemiskinan multidimensional di Kalimantan Barat pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 2.060.569 orang berada pada garis kemiskinan, dari jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 4,40 juta orang. Hal ini berarti sebanyak 40,2% penduduk di Kalimantan Barat masih hidup dibawah garis kemiskinan, dimana sebaran penduduk miskin paling banyak di wilayah pedesaan, yaitu sebanyak 1.726.992 orang, selebihnya berada di wilayah perkotaan (Budiantoro, *et.al.*, 2015). Kemiskinan merupakan suatu permasalahan pokok pada masyarakat perbatasan, terutama bagi kaum perempuan. Hal ini merupakan sebagai akibat dari rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

Dalam perkembangan masyarakat masa kini, isu kemiskinan tidak dapat terpisahkan dari isu perempuan terutama perempuan yang hidup di wilayah pedesaan, khususnya pedesaan wilayah perbatasan negara. Kemiskinan merupakan alat penindasan utama atas ketidakberdayaan perempuan pedesaan. Mereka memiliki pendidikan yang rendah, serta kemampuan bersaing yang sangat terbatas. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pun masih sangat terbatas oleh dimensi-dimensi yang menindas mereka, seperti dimensi ekonomi, politik dan budaya.

Ketika suatu kemiskinan sudah dianggap sebuah budaya 'miskin' pada masyarakat pedesaan, tidak terlihat lagi dimana ketimpangan dan ketidakadilan itu. Padahal tampak jelas ketimpangan dan ketidakadilan itu menimpa hampir seluruh perempuan yang hidup di pedesaan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik adanya pengelompokan disposisi yang berlainan dari kegiatan produksi atau kapitalisme itu terdapat kekuasaan yang beroperasi melalui pengembangan prasarana kultural yang dikembangkan oleh pihak luar. Dengan demikian budaya kemiskinan diperkenalkan kepada seluruh anggota masyarakat tersebut, sehingga mereka tidak menyadari terdapat sistem struktural yang dengan sengaja memiskinkan mereka.

Sebuah keluarga miskin di pedesaan acapkali mampu hidup dengan keterbatasan, mereka dapat melakukan *survive*, baik dalam bentuk uang maupun makanan seadanya. Perempuan-perempuan ikut menjadi tulang punggung keluarga mereka. Namun pada umumnya sebuah keluarga yang jatuh pada lingkaran kemiskinan sangat sulit untuk bangkit kembali, kecuali apabila memiliki jaringan atau pun pranata sosial yang melindungi dan menyelamatkan mereka. Dan kondisi ini tidak terlepas dari kondisi struktural yang selama ini membelenggu mereka untuk tetap berada dalam garis kemiskinan. Sehingga perempuan-perempuan ikut menanggung kemiskinan yang membelenggu keluarga mereka.

Salah satu indikator penyumbang dampak kemiskinan pada perempuan pedesaan adalah pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan suatu indikator penting untuk menjadi *social modal* bagi perempuan dalam upaya mencapai taraf hidup yang lebih baik. Namun faktanya tingkat pendidikan penduduk di perbatasan Jagoi masih dalam katogori rendah. Dampak dari rendahnya pendidikan ini yaitu kurangnya

pengetahuan serta *skill* mereka untuk dapat menciptakan suasana hidup yang lebih baik.

Kehidupan perempuan di perbatasan Jagoi Babang masih mengandalkan sumber alam sebagai sumber penghasilan utama. Sekitar 90% perempuan yang mendiami wilayah Jagoi adalah perempuan suku Dayak sub-suku Bidayuh dan Bekatik. Seperti yang terlihat, sumber penghidupan mereka yang mendiami wilayah perbatasan Jagoi Babang berasal dari mata pencaharian sebagai petani padi. Mengikuti nenek moyang mereka jaman dahulu, perempuan Dayak masih menerapkan sistem berladang secara tradisional. Hasil tani yang mereka dapatkan pun hanya untuk keperluan keluarga mereka saja, tidak untuk dijual.

Selain bertani padi mereka juga membudidayakan karet sebagai sumber pendapatan tambahan. Mereka menyebutnya "*mutong'k*" atau yang berarti menyadap pohon karet kemudian diambil airnya untuk diolah dan dijual sebagai penghasilan ekonomi tambahan. Banyak diantara mereka yang pekerjaannya hanya *mutong'k* untuk menyambung roda perekonomian keluarga mereka. Peran ganda yang dilakoni perempuan perbatasan, selain sebagai ibu bagi anak-anak mereka juga merupakan sebagai penopang ekonomi keluarga. Data demografi kecamatan Jagoi Babang tahun 2013 menunjukkan jumlah perempuan sebanyak 3.323 jiwa dan rata-rata mereka masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan dan Praktik *Humman Trafficking*

Kawasan perbatasan merupakan halaman terdepan sebuah negara, dalam kata lain wilayah perbatasan disebut sebagai 'beranda negara'. Namun fakta yang ada hingga saat ini kawasan perbatasan di Jagoi Babang masih ditandai dengan adanya keterbelakangan, baik dari segi wilayah, SDM (sumber daya manusia), dan aktivitas ekonomi masyarakat lokal (*local community*) yang masih terisolasi. Kondisi ini ditandai dengan keterbatasan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan, sehingga akses untuk mengejar ketertinggalan sangat kecil.

Sebagai akibatnya masyarakat lokal berpeluang kecil untuk dapat mengakses sumber-sumber penghidupan ekonomi dan sosial sebagai pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Pada umumnya perekonomian di kawasan perbatasan Jagoi masih didominasi oleh sektor perdagangan dan pertanian. Perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan lintas batas, dimana barang-barang dagangan yang dijual di perbatasan Jagoi semuanya berasal dari Malaysia.

Demikian pula dengan masyarakat di Jagoi, sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, mereka menggelar perdagangan lintas batas—dimana penjual dan pembeli dari dua negara (Malaysia dan Indonesia) datang bersamaan di tempat yang sama untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar Serikin merupakan nama pasar yang terletak di bagian wilayah Sabah, Malaysia yang berbatasan langsung dengan wilayah Jagoi, Kalimantan Barat, Indonesia. Disana perdagangan digelar pada akhir pekan (hari sabtu dan minggu). Para penjual tidak hanya masyarakat lokal saja, namun mereka juga dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, sedangkan para pembeli berasal dari berbagai daerah di Sarawak, Malaysia (ada yang berasal dari daerah Sabah, Johor Baharu, Kuching, dan Miri).

Beberapa komoditi hasil bumi dan kerajinan masyarakat dari Indonesia dipajang di pasar Serikin. Hampir semua hasil bumi dan kerajinan yang dihasilkan dari wilayah Jagoi dipasarkan di pasar Serikin, diantaranya sayur-sayuran dan rempah-rempah seperti lada, daun singkong, rebung (pucuk bambu), dan banyak lagi. Selain itu juga kerajinan tangan khas masyarakat lokal (Suku Dayak) seperti kerajinan Bidai, tas kulit kayu, pernak pernik, dan berbagai macam anyaman dari bambu dan rotan. Namun pada kenyataannya masyarakat di perbatasan Jagoi masih jauh dari kata sejahtera, mereka masih terbelenggu oleh kemiskinan. Salah satu penyebab yaitu rendahnya pendidikan masyarakat di perbatasan Jagoi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kecamatan Jagoi Babang Tahun 2013

No	Tingkat Pendidikan	Banyaknya (Orang)	Persentase (%)
1.	Belum Sekolah	953	11.51
2.	Tidak/Belum Tamat SD	882	10.65
3.	Tamat SD/Sederajat	2.800	33.82
4.	Tamat SLTP/Sederajat	1.850	22.35
5.	Tamat SLTA/Sederajat	1.050	12.68
6.	Lainnya	742	8.96
Jumlah		8.277	100.00

Sumber: Data Monografi Kec. Jagoi Babang, 2013.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di perbatasan Jagoi masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat secara kuantitas, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tamat SD ke bawah yaitu sebanyak 4.635 orang atau 58.78%. Sarana dan prasarana sekolah yang minim menjadi penyebab banyaknya mereka yang tidak mengenyam pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ini memberi dampak bagi pola pikir orang tua, bahwasannya anak-anak mereka harus membantu perekonomian keluarga.

Belum lagi keterbatasan akses menuju beberapa desa di Jagoi Babang dapat dibidang sangat sulit, seperti Desa Sinar Baru yang tidak memiliki akses jalan darat. Untuk menuju desa ini menggunakan akses lewat sungai dengan waktu tempuh 5-6 jam dengan menggunakan transportasi *speed boat*, tentu dengan harga yang cukup mahal. Tidak ada akses listrik, akses internet di desa tersebut sehingga masyarakat masih hidup dalam keadaan terisolir dari wilayah Indonesia, sementara untuk menuju Malaysia hanya menempuh waktu sekitar 1 jam melewati jalur darat yang biasa disebut oleh masyarakat setempat sebagai "jalan tikus".

Kondisi ini mengakibatkan tidak sedikit anak-anak perempuan yang kemudian bekerja di Malaysia di usia belia. Bahwasannya kemiskinan telah membawa mereka diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga, bahkan menjadi pelayan nafsu lelaki di diskotik-diskotik di wilayah Sarawak, Malaysia. Banyak diantara mereka yang

mengalami kekerasan dalam bekerja, kekerasan seksual, dan eksploitasi. Yang mana akar dari segala permasalahan pelit tersebut adalah karena kemiskinan. Cullen-DuPont (2009:23) mengungkapkan "*Poverty is perhaps the greatest underlying cause of human trafficking from and within countries of origin.*" Memang benar demikian keadaannya di perbatasan Jagoi, bahwa kondisi keluarga mereka yang miskin memaksa mereka untuk mengadu nasib di negeri orang.

Kita selalu beranggapan bahwa "kemiskinan" (*poverty*) adalah penyebab utama di balik terjadinya *trafficking*. Untuk sebagian, anggapan ini bisa jadi benar. Orang-orang miskin, khususnya di negara-negara berkembang, tidak memiliki banyak pilihan dalam hidupnya, dan karenanya mereka seolah-olah "dipaksa" untuk meninggalkan kampung halaman atau komunitasnya dalam rangka untuk "bertahan hidup" atau untuk mencari kesempatan yang lebih baik secara ekonomi di tempat atau negara lain (Subono, 2010:31). Memang demikianlah adanya bahwa kemiskinan ini pula yang 'memaksa' banyak anak perempuan di perbatasan bekerja di negeri Jiran, bahkan diantaranya laki-laki yang menjadi buruh di perusahaan sawit di Malaysia.

Kesimpulan

Kenyataan akan banyaknya perempuan di perbatasan Jagoi yang kemudian memilih untuk menjadi TKW yang ilegal di Malaysia merupakan bentuk eksploitasi terhadap perempuan perbatasan. Tidak jarang mereka menjadi pelacur di kawasan perusahaan sawit di wilayah Sabah, Malaysia. Dan tidak jarang pula mereka yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga mengalami penyiksaan dari majikan mereka. Sudah menjadi korban praktik *trafficking*, kemudian ditambah lagi menjadi korban penyiksaan bahkan eksploitasi seksual.

Kenyataan yang demikian adanya sungguh memprihatinkan, dan sudah selayaknya kita menghentikannya. Kemiskinan yang berujung kepada praktik *trafficking* dan eksploitasi terhadap perempuan pedesaan di perbatasan Jagoi ini akan terus berkelanjutan, sehingga seolah-olah menjadi suatu kebudayaan yang melekat pada masyarakat; bahwasannya anak perempuan sepatutnya bekerja menjadi TKW di Malaysia untuk meringankan beban ekonomi keluarga mereka.

Bicara mengenai praktik *human trafficking* tidak akan terlepas pada jangkauan yang lebih luas lagi. Kejahatan internasional ini dalam perkembangannya kemudian berkaitan erat dengan faktor keamanan negara (*state security*). Namun pada tingkat pedesaan, dimensi ketidakberdayaan secara ekonomi menjadi faktor krusial terjadinya praktik ini, terutama pada masyarakat pedesaan yang mendiami wilayah perbatasan Jagoi Babang.

Daftar Pustaka

- _____. 2013. Profil Kecamatan Jagoi Babang.
- Budiantoro, Setyo. *et.al.* 2014. *Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2012-2014*. Jakarta: Prakarsa.

- Cullen-DuPont, Kathryn. 2009. *Global Issues: Human Trafficking*. United States of America: Infobase Publishing.
- Elyta. 2012. *Penanggulangan perdagangan perempuan di perbatasan entikong kabupaten sanggau provinsi kalimantan barat: perspektif keamanan manusia*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Niko, Nikodemus. 2015. *Potret Kehidupan Anak di Batas Negeri*. Kantor Berita Anak Indonesia (KBAI). <http://kantorberitaanakindonesia.com/potret-kehidupan-anak-di-batas-negeri.html> (diakses 29 Januari 2016, 15.30)
- Rosenberg, Ruth. (ed). 2003. *Perdagangan perempuan dan anak di indonesia*. ICMC&ACILS: Jakarta.
- Subono, Nur Iman. Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan. *Jurnal Perempuan*. Vol. 68. Tahun 2011. Hal 21-36